

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara secara keseluruhan tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Peranan perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro maupun menyalurkan pinjaman dalam bentuk kredit. Masyarakat yang memiliki usaha sendiri-wirusaha maupun perusahaan swasta dalam rangka menjalankan proses bisnis nya pasti membutuhkan permodalan yang dapat diperoleh melalui pinjaman yang ditawarkan oleh Bank. Pemberian kredit membawa dampak pada pelaku utamanya, bagi Bank pemberian kredit merupakan bisnis terbesar. Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian Bank merupakan sumber pendapatan terbesar.

Kredit merupakan salah satu produk Bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah juga merupakan salah satu media bagi Bank dalam berkontribusi dalam pembangunan. Bagi pengusaha atau wirusaha dengan adanya kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha. Kredit dapat



meningkatkan kinerja perusahaan dan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. Dan bagi negara kredit merupakan sarana dalam memacu pembangunan, meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar, kredit juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Pemberian kredit merupakan suatu proses yang membutuhkan pertimbangan dan analisis yang baik untuk menghindari kemungkinan kerugian yang diderita bank sebagai akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Pada dasarnya sebelum memberikan kredit, seorang pimpinan diberi wewenang untuk memutuskan pemberian kredit, selalu memperhatikan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan seperti : besarnya jumlah kredit yang diminta, tujuan penggunaan kredit, bentuk dan jaminan yang diberikan serta beberapa pertimbangan lainnya yang diperlukan.

Pemberian kredit ini merupakan salah satu pendapatan utama bank, namun beberapa kredit yang diberikan bank dapat menjadi suatu permasalahan yang serius. Analisis terhadap pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah sangat penting untuk menjamin aktivitas bank sehingga bank dapat mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dan dapat menekan timbulnya risiko kredit, yaitu dengan jalan mengadakan analisis terhadap kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah sebelum kredit tersebut diberikan. Setelah bank memberikan pinjaman kredit pada nasabah, bank juga perlu melakukan pengawasan secara berkala, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya agar tidak sampai terjadi tunggakan kredit yang nantinya berdampak pada terjadinya kredit macet. Oleh karenanya untuk dapat meminimalisasi terjadinya risiko

pemberian pinjaman Bank membutuhkan struktur dan proses pengendalian yang baik.

Bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan adanya suatu pengendalian kredit. Tujuan pengendalian ini adalah menghilangkan risiko atau setidaknya tidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagai penyalur pinjaman bank tidak melakukan pengendalian dan analisa dengan tepat, maka bank dapat menghadapi berbagai kondisi seperti prosedur yang tidak tepat, jaminan yang tidak sesuai hingga kredit macet yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi bank itu sendiri, nasabah, masyarakat bahkan negara. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan risiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitor.

Prosedur yang salah dapat membawa risiko bagi bank, contohnya apabila debitor menandatangani perjanjian kredit yang cacat hukum, maka posisi bank menjadi lemah dan apabila debitor mengetahuinya, maka kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh debitor untuk mendapatkan celah keuntungan. Jaminan yang tidak diikat dengan baik, atau kesalahan dalam prosedur pengikatan jaminan juga menjadi risiko yang dihadapi bank. Ketika Debitor mengalami kegagalan bayar maka langkah akhir yang diambil bank adalah dengan mengusahakan *recovery* dari

jaminan yang diserahkan, tetapi karena jaminan tidak diikat sebagaimana mestinya, bank tidak dapat melakukan eksekusi sehingga bank tidak memperoleh pengembalian dana pinjaman yang telah diberikan. Hal-hal tersebut merupakan dampak dari risiko utama bank yakni kredit macet.

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK DI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah proses pengendalian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Bank di Surabaya ?
2. Bagaimanakah pengendalian kredit modal kerja yang efektif pada Bank di Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Mengkaji proses pengendalian kredit yang diterapkan Bank di Surabaya
2. Mengkaji efektivitas pengendalian kredit pada Bank di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi bank dalam mengelola risiko perusahaan untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai terutama dalam kegiatan pemberian kredit.

b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengendalian pada proses pemberian kredit dapat lebih efektif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah, maka untuk mempermudah penulisan maka diperlukan suatu batasan permasalahan. Adapun ruang lingkup penelitian yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengetahui tahapan dan prosedur pemberian kredit khususnya kredit modal kerja dengan jumlah plafon kredit melebihi Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah) yang dilakukan Bank di Surabaya periode 2016-2017.
2. Mengetahui pengendalian kredit modal kerja yang efektif pada Bank di Surabaya periode 2016-2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad (2013) yang berjudul : Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mega Cabang Makassar. Hasil penelitian menunjukkan observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (analisis deskriptif). Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau Debitor maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cindy Aditya (2015) yang berjudul : Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Pada PT. BPR Shinta Daya Sleman, Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus deskriptif. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penulis membuat

kuesioner yang berisi tentang pengendalian intern dengan teori COSO Statement untuk melihat apakah pengendalian intern pada prosedur kredit PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan teori tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada prosedur kredit PT. BPR Shinta Daya sangat efektif, namun masih terdapatnya kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu diharapkan PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta memperhatikan dan mengkaji ulang pengendalian intern atas prosedur kredit yang akan diberikan oleh nasabah.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramuris Prismawanti (2014) yang berjudul : Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Studi pada PT. BANK BUKOPIN Tbk Cabang Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta. Data penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode kualitatif (analisis deskriptif). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengajuan kredit PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta terdiri atas beberapa prosedur, yaitu permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, dan pelunasan kredit, serta telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern. Adapun pengendalian intern PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta sudah efektif, masing-masing unit atau divisi memiliki

tugas dan wewenang yang jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Serta telah mencapai tujuan dari pengendalian intern pemberian kredit yaitu, keandalan pelaporan keuangan pemberian kredit, efektivitas dan efisiensi pemberian kredit, ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Muzamil (2015) yang berjudul : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada Bri Kota Samarinda (Studi Kasus di BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan. Saran utama bagi BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda sebaiknya BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda memisahkan fungsi tugas di bagian kredit agar tidak terjadi perangkapan tugas seperti teori yang dikemukakan oleh Mulyadi tentang unsur-unsur sistem pengendalian internal tahun 2008.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Kasmir (2010), mengatakan pengertian bank adalah “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.”

2.2.1.2 Jenis Bank

Dalam menjalankan kegiatannya, terdapat beberapa jenis Bank yang berbeda-beda baik berdasarkan fungsi maupun jenis kegiatan operasional.

a) Jenis Bank berdasarkan Fungsi :

1. Bank Sentral. Pengertian bank sentral menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*.

2. Bank Umum. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 pengertian bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut dengan bank komersial.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b) Jenis Bank berdasarkan Kegiatan Operasionalnya :

1. Bank Konvensional

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional serta dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran setiap nasabah. Prinsip konvensional yang dilakukan oleh bank konvensional menurut Martono (2002), diantaranya adalah :

- Menentukan bunga sebagai harga disemua produk jasa keuangannya, seperti tabungan, deposito berjangka dan lain-lain
- Menggunakan biaya atau prosentasi tertentu disetiap jasa-jasa keuangan bank, seperti biaya administrasi dan lain-lain.
- Penetapan biaya dalam bank disebut sebagai fee based.

2. Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 10 Th. 1998 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah islam serta dalam segala aktivitasnya memberikan jasa dalam laulintas pembayaran seperti bank konvensional.

Asas syariah yang digunakan berdasarkan pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Th. 1998 aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan syariah, diantaranya adalah

- Pembiayaan berdasarkan asas bagi hasil (mudharabah),
- Pembiayaan berdasarkan asas penyertaan modal (musyarakah),
- Asas jual beli barang dengan keuntungan (murabahah),
- Pembiayaan barang modal berdasarkan asas sewa murni tanpa pilihan (ijarah),
- atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2.1.3 Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006: 9).

1. Fungsi Bank Sebagai *Agent of Trust*

Fungsi bank sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga yang berlandaskan pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah

kepercayaan, baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam hal ini Masyarakat atau nasabah akan mau menyimpan dana dananya di bank jika dilandasi dengan kepercayaan. Dalam fungsi bank ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini juga akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini sangatlah penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana ini.

2. Fungsi Bank Sebagai *Agent of Development*

Fungsi bank sebagai *agent of development* ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3. Fungsi Bank Sebagai *Agent of Services*

Fungsi bank sebagai *agent of service* merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya

tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.2.2 Efektivitas

2.2.2.1 Pengertian Efektivitas

Suatu kegiatan perusahaan, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui usaha-usaha atau aktivitas yang dilakukannya. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Martoyo (2002:4) yaitu “efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi

tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini:

Gambar 2.1

Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

(Sumber: Mahmudi, 2005:92)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil tujuan yang dikehendaki.

Pendapat lain dinyatakan oleh Sedarmayanti yang menyatakan “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. (Sedarmayanti, 2009:59). Sehubungan dengan pendapat tersebut efektivitas merupakan ukuran yang menjadikan program yang dijalankan efektif atau tidak.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensi, yang artinya bahwa dalam mendefinisikan efektivitas dapat menjadi berbeda-beda sesuai

dengan dasar ilmu yang akan digunakan walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2.2.2.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Efektivitas dapat diukur apabila terdapat indikator sebagai ukuran efektivitas.

Menurut Campbell, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pengukuran efektivitas perlu untuk dilakukan agar tujuan dari organisasi atas lembaga dapat dievaluasi berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Penetapan ukuran efektivitas akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2.2.3 Pengendalian Intern

2.2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Didalam aktivitas penyaluran kredit, bank dituntut untuk memiliki pengendalian kredit agar kredit yang diberikan kepada calon debitur berjalan

sesuai dengan tujuan pemberian kredit tersebut. Pengendalian kredit yang baik tidak terlepas dari adanya pengendalian internal yang juga memiliki peran penting bagi kelangsungan kegiatan perusahaan sebab pengendalian intern memerikan kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Pengertian pengendalian intern menurut The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) adalah : "Pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai."

Pengendalian dalam suatu organisasi bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber dayanya termasuk pegawai secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan organisasi. Pengendalian juga dimaksudkan untuk mengawasi manajemen agar setiap kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, meskipun undang-undang tersebut tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan.

Dari uraian pengendalian intern diatas terdapat beberapa konsep dasar berikut (M hmad - 2014) :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infra struktur perusahaan.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris perusahaan. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2.2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh mir badi Jusuf 2011:137) pengendalian intern adalah “Suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a) Keandalan pelaporan keuangan (*Reliability of Financial Reporting*)

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan

pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

- b) Efektivitas dan efisiensi operasi (*Efficiency and Effectiveness of Operations*)

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (*Compliance With Applicable Laws and Regulations*)

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.2.3.3 Komponen-Komponen Pengendalian Intern

Agar tujuan pengendalian intern tercapai maka diperlukan komponen-komponen pengendalian intern yang saling berhubungan. Apabila salah satu komponen tidak mencukupi maka keseluruhan pengendalian intern tidak akan berjalan efektif walaupun komponen lainnya sangat efektif.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik Nomor 24 (2011:319) komponen-komponen dan struktur dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian perusahaan terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Nilai integritas dan etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Dewan komisaris dan komite audit.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penetapan Risiko (*Risk Assesment*)

Kesatuan perkiraan risiko yang timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi.
- b. Personel baru.
- c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.
- d. Teknologi baru.
- e. Lini produk, produk atau aktivitas baru.

- f. Operasi luar negeri.
- g. Standar akuntansi baru.

3. Informasi Komunikasi (*Information and communication*)

Tujuan dari laporan informasi dan komunikasi adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi dalam perusahaan serta menyelenggarakan pertanggungjawaban terhadap *asset* perusahaan.

4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan serta tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian digolongkan sebagai berikut:

- a. Pengendalian pengolahan informasi.
- b. Pemisahan fungsi yang memadai.
- c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.
- d. *Review* atas kinerja.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian

pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.2.4 Kredit

2.2.4.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang memiliki arti “saya percaya”, (Firdaus dan Ariyanti, 2009:1) yang mana jika diperluas pemberian kredit kepada nasabah artinya memberikan kepercayaan. Pengertian kredit menurut UU Nomor 10 tahun 1998 mengenai Perbankan Pasal 1 angka 11 adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

2.2.4.2 Unsur – Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Firdaus dan Ariyanti, 2009:3).

1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut Debitor
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap Debitor
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari Debitor kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari Debitor.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh Debitor kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2008). Penilaian kredit dengan metode analisis 5C, yaitu:

1. ***Character***

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang

bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai calon Debitor dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon Debitor, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon Debitor yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.

Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Kepribadian juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon Debitor, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon Debitor disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebagai kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat dipertimbangkan

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai prospek atau sebaliknya. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon Debitor agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. *Payment*

Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon Debitor

sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.4.3 Fungsi Kredit

Kredit menurut Kasmir (2012:88) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh uang bank atau bukan bank akan dapat digunakan oleh Debitor untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi

pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan mendapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antar penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. Maka dengan adanya kredit, maka terlaksana pula program pemerintah yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi juga dilaksanakan oleh pihak swasta nasional sesuai dengan keputusan pemerintah. Tentu saja dalam melaksanakan pembangunan tersebut akan lebih banyak memerlukan modal, oleh karena itu pengusaha ekonomi lemah yang kekurangan modal dapat mengajukan permohonan kredit yang sangat membantu dalam pembangunan nasional

2.2.4.4 Tujuan Kredit

Tujuan kredit menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2008: 100) , diantaranya:

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. jika bank yang terus-menerus menderita

kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. dengan dana tersebut, maka pihak Debitor akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.4.5 Jenis Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum mengenai jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2010:76) dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk pembiayaan atas aset modal usaha, seperti bangunan, atau mesin

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan

untuk mendukung kegiatan usaha seperti membiayai pembelian barang modal.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon Debitor.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon Debitor dalam berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

2.2.4.6 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan dan fungsi dari suatu bank, sehingga salah satu sumber pendapatan terbesar bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit melalui pendapatan bunga. Penyaluran kredit menurut Ismal (2010:26) adalah kegiatan penyaluran dana dari bank kepada nasabah (Debitor) dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2.2.4.7 Analisis Kredit

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility study*) atas perusahaan pemohon kredit. (Firdaus & Ariyanti 2009:184). Menurut Thomas Suyatno, dkk (2003:70) yang dimaksud dengan analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah Suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

2.2.4.8 Pengendalian Kredit Bank

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, tentunya akan menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan perkreditannya, misalnya kredit macet. Masalah kredit macet yang dihadapi oleh bank dapat dicegah dengan adanya pengendalian kredit. Peran pengendalian kredit sangat penting bagi bank, karena pengendalian kredit tersebut dapat meminimalkan

terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang dapat merugikan bagi bank. “Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit agar tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar” (Hasibuan, 2005:105). Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya pengendalian kredit merupakan usaha untuk menjaga agar kredit tetap dalam kondisi lancar dengan memperhatikan aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pengendalian intern kredit.



2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



